

KEBIJAKAN KEAMANAN PEMERINTAH SWEDIA TERKAIT PENGUNGS TAHUN 2015-2020

Asenda Mathius¹, Roberto Octavianus Cornelis Seba², Christian H.J de Fretes³
^{1,2,3} Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana

Article History

Received : 21-September-2023
Revised : 21-September-2023
Accepted : 06-November-2023
Published : 07-November-2023

Corresponding author*:

Asenda Mathius

Contact:

asendamathius@gmail.com

Cite This Article:

Mathius, A., Seba, R. O. C. ., & de Fretes, . C. H. . (2023).
KEBIJAKAN KEAMANAN
PEMERINTAH SWEDIA
TERKAIT PENGUNGS
TAHUN 2015-2020. Jurnal Ilmiah
Multidisiplin, 2(6), 101–111.

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jukim.v2i6.1002>

Abstract: *In late 2015, Sweden received a mass influx of people seeking protection. Sweden as a country that upholds welfare must face tremendous challenges because Sweden is know for being open to refugees. Behind Sweden open attitude towards refugees, it was never expected that that flow of refugees would pose a threat to the country security. The Schengen Agreement that Sweden has signed makes an open-border system for member countries but with the threats that occur for the security and stability of the welfare of the Swedish state to change to a u-turn policy. Sweden firm stance on refugees has created new policies and rules to monitor and guard against the excessive influx of refugees. Securitization is one of the action taken by Sweden as a first step to overcome the problem of the refugee surge that occurred.*

Keywords: Sweden, Refugees, Securitization, national security

Abstrak: Akhir tahun 2015, Swedia menerima arus pengungsi secara massal untuk mendapatkan perlindungan. Swedia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi kesejahteraan harus berdepan dengan tantangan yang luar biasa karena Swedia terkenal sebagai negara yang terbuka terhadap pengungsi. Di balik sikap Swedia yang terbuka terhadap pengungsi, tidak pernah menyangka bahwa arus pengungsi yang terjadi menjadi ancaman non-tradisional terhadap keamanan negara. Perjanjian Schengen yang telah ditandatangani Swedia membuat sistem open-border bagi negara anggota diberlakukan tetapi dengan adanya ancaman yang terjadi bagi keamanan dan kestabilan kesejahteraan negara Swedia mengubah kepada u-turn policy. Sikap tegas Swedia terhadap pengungsi ini membuat kebijakan dan aturan baru bagi mengawasi dan mengawal dari masuknya pengungsi yang berlebihan. Sekuritisasi merupakan salah satu tindakan yang dilakukan Swedia sebagai langkah awal bagi mengatasi masalah lonjakan pengungsi yang terjadi ini.

Kata Kunci: Swedia, Pengungsi, Sekuritisasi, Keamanan Nasional

PENDAHULUAN

Swedia merupakan bagian dari wilayah *Skandinavia*, menjadi salah satu negara yang menggunakan sistem Sosial Demokrasi (*Social Democracy*) di Eropa. Tingkat demokrasi Swedia berada pada tingkat inklusif yang tinggi sehingga sampai saat ini, negara Swedia berhasil menjadi salah satu dari beberapa negara di eropa yang di label sebagai negara kesejahteraan tradisional yang terbaik karena masih mempertahankan dan mengadopsi sistem kesejahteraan tradisional. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana sistem pemerintahan Swedia dalam presentasi pada bagian dana publik dan di beberapa bagian sektor yang sangat berfungsi dan berjalan dengan baik. Masyarakat Swedia mendapatkan layanan publik yang cukup baik dan terpenuhi diantaranya, pendidikan yang gratis, biaya perubatan kesehatan yang rendah, dan tunjangan bagi para penganggur di Swedia. Menurut dari *world data.info* jumlah populasi di Swedia bertambah tiap tahun dan di catatkan populasi sejak 1960-2021 meningkat dari 7.48juta menjadi 10.42 jiwa, yang dimana dapat dikatakan pertumbuhan dari populasi ini signifikan tiap tahunnya dengan jumlah peningkatan yang paling tinggi dicatatkan adalah pada tahun 2017 [1].

Jumlah para pengungsi dan pencari suaka juga turut meningkat tiap tahun dengan berbagai alasan dan motivasi agar dapat masuk ke Swedia. Para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Swedia dicatatkan masuk sejak Perang Dunia II dan datang ke Swedia dari tahun 1980-1990. Kebanyakan mereka yang datang dari Iran, Iraq, Lebanon, Syria, Turkiye, negara dari Amerika Selatan dan beberapa negara lain untuk mencari perlindungan akibat konflik, peperangan yang terjadi di negara asal dan beberapa faktor lain yang mendorong masuknya para pencari suaka, pengungsi dan migran. Sejarah panjang dari gelombang pengungsi ini berterusan akibat dari perang antara Iran dan Irak dari tahun 1980-1989 yang membuat hampir dari 7,000 warga Irak dan 27,000 warga Iran dijanjikan izin tinggal di

Swedia sebagai pengungsi berdasarkan kepada Konvensi Jenewa. Warga negara Chile dicatikan sebagai warga negara yang terbanyak di Swedia akibat dari rezim Augusto Pinochet yang terjadi sejak 1973-1990 sehingga membuat Swedia menjadi negara ketiga yang memiliki komunitas Chile di luar negara asal mereka. Jumlah imigran dari Yugoslavia turut bertambah akibat dari adanya perang di Balkan pada tahun 1990 dimana lebih 100,000 Bosnia dan 3,600 Kosovo Albanians yang datang ke Swedia diberikan suaka [2]. Jumlah pengungsi yang ada di Swedia pada tahun 2020 dari Afghanistan 72,278, Iran 800,025, Iraq 270,377 dan Suriah 6,702,910 [3].

Jumlah populasi di Swedia mengalami peningkatan saat Swedia bergabung bersama negara Uni Eropa dan menandatangani Perjanjian *Schengen* yang ditandatangani Swedia pada tahun 1996 dan implementasi atas perjanjian tersebut dilaksanakan pada tahun 2001 [4]. Kesepakatan dalam Perjanjian *Schengen* mewajibkan adanya *open border* bagi semua warga negara Uni Eropa. Negara Swedia sudah lama menjadi tempat bagi pengungsi untuk mencari tempat perlindungan. Tidak hanya hal tersebut, Swedia sangat menitikberatkan masalah pengungsi yang berdatangan untuk mencari suaka. Swedia memiliki historis yang panjang sehingga ingin menjadi *safe heaven* bahkan ingin menciptakan tempat yang nyaman dengan memberikan fasilitas yang mendukung bagi para pengungsi dan pencari suaka. Setiap tahun jumlah para pengungsi bertambah, karena respon baik yang diberikan sehingga membuat adanya rasa terlindungi dan aman karena penerimaan Swedia terhadap mereka yang ingin mendapatkan tempat berlindung.

Pemerintah Swedia tidak pernah memprediksi bahwa akan menerima begitu banyak pengungsi yang datang sehingga membuat kondisi menjadi tidak terkendali karena harus mencari tempat bagi pengungsi ini tinggal sementara waktu [5]. Situasi menjadi tidak terkendali hingga akhir November 2015, Asa Romson, wakil dari Perdana Menteri Swedia, mengumumkan perubahan kebijakan terkait pengungsi dari *Open-Door Policy* menjadi kepada *U-Turn Policy* [6]. Akhir tahun 2015 menjadi tahun yang sangat sulit bagi pemerintah Swedia, hingga tahun 2016, Perdana Menteri Swedia mengeluarkan *statement* bahwa "*If we do not create a new common and sustainable asylum system, more countries will be forced to act unilaterally.... We must move from chaos to control*" menjelaskan pengungsi di Swedia ini memberikan dilematis terhadap keamanan negara Swedia akibat dari kondisi kedatangan pengungsi di Swedia sangat kacau [7].

Kebijakan baru yang diberlakukan oleh Swedia adalah bertujuan untuk mengawal dan memperketat perbatasan yang secara tidak langsung keamanan dari masuknya pengungsi dan migran yang ilegal ke dalam negara bahkan ada beberapa kebijakan lain yang berkaitan batas waktu para pengungsi tinggal selama 2 tahun dengan aturan perpanjangan izin tinggal yang ditetapkan, reunifikasi keluarga dengan syarat memiliki tempat layak untuk dihuni serta mampu untuk hidup dengan layak, dan mampu untuk menghidupi diri sendiri dengan layak serta beberapa kebijakan lain yang bertujuan untuk pengetatan dan keamanan dari masalah pengungsi di Swedia [8].

Kebijakan yang diberlakukan kepada semua negara anggota Uni Eropa membuat Swedia harus merespon dan menyaring dari masuknya pengungsi karena aturan tersebut diberlakukan kepada semua negara anggota terdapat juga regulasi dan aturan yang perlu di ikuti oleh pengungsi atau pencari suaka. Mengacu kepada perubahan kebijakan pemerintahan Swedia bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Swedia dalam menghadapi krisis pengungsi agar tetap menjaga nama Swedia sebagai negara kesejahteraan. Dalam penelitian kebijakan keamanan pemerintah Swedia terkait pengungsi tahun 2015-2020 menggunakan teori dari Sekuritas terkait dengan bagaimana saat satu negara yang tidak berada dalam kondisi perang turut menerima ancaman keamanan tetapi bukan berupa ancaman kekuatan melainkan arus masuk pengungsi yang merupakan ancaman non-tradisional.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif di dalam mengetahui permasalahan yang ada, penelitian pada dasarnya digunakan dalam ilmu sosial berkaitan dengan pola dan tingkah laku manusia atau *behavior* yang sulit diukur dengan angka-angka. Penelitian kualitatif juga sebuah penelitian yang berpangkal dari pola pikir yang induktif, didasarkan atas pengamatan sebuah obyektif partisipatif terhadap suatu fenomena atau gejala social [9]. Dalam penelitian ini, melihat fenomena masalah peningkatan migrasi dan pengungsi di Swedia serta kompleksitas dalam perubahan kebijakan dan tantangan yang dihadapi oleh Swedia.

Teknik pengumpulan data adalah metode dan cara yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data yang akan mendukung dalam penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur melalui bentuk tulisan-tulisan, berita, dokumen yang penting dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan di mana di ambil. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, dimana di dalam pengambilan data primer penulis mendapat melalui dokumen yang telah dirilis resmi oleh pemerintah Swedia, pidato kenegaraan, para partai yang ada serta wawancara. Manakala, data sekunder diperoleh lewat berbagai sumber lain seperti artikel ilmiah, buku-buku, jurnal dan berita yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Awal Masuk Pencari Suaka dan Pengungsi serta Program *Resettlement* di Swedia

Sejarah pencari suaka dan pengungsi datang ke Swedia sejak Perang Dunia II sebagai tempat untuk berlindung selama perang yang terjadi di negara asal mereka. Dari tahun 1980-1990 kebanyakan para pengungsi datang dari Kawasan Timur Tengah seperti Syria, Iraq, Jordan, Yeman, Turki, Iran, Lebanon dan Afganistan. Perang panjang yang terjadi merupakan hasil dari gagalnya pemimpin dan sistem politik khususnya perang antara negara Irak dan Iran terjadi sejak tahun 1980-1989 yang mengakibatkan hampir 7,000 warga Irak dan 27,000 warga Iran kemudian mendapatkan tempat dan tinggal di Swedia berdasarkan dari Konvensi Jenewa [2]. Perang panjang yang terjadi tidak hanya berdampak kepada kedua negara yang sedang berperang tetapi negara lain karena kebanyakan warga yang berdampak tidak memiliki tempat tinggal dan bahan makan yang cukup ditambah dengan tingginya resiko kematian yang terjadi sehingga dampak dari perang di timur tengah ini membuat warga harus mengungsi ke negara yang lebih aman dan layak untuk dihuni. Jumlah para pengungsi juga bertambah akibat dari perang dan ketidakstabilan kondisi negara saat perang. Status dari pengungsi ini sendiri juga telah ditetapkan sebagai orang yang wajib mendapatkan perlindungan sehingga mereka dapat kembali ke negara asli mereka atau negara ketiga yang ditetapkan.

Swedia merupakan salah satu negara yang melaksanakan *resettlement* sejak tahun 1950, adanya *The Swedish Resettlement Program* bertujuan untuk membantu para pengungsi ditengah kekacauan yang terjadi dan pengungsi dapat menunggu informasi penerimaan ijin tinggal di negara ketiga atau *host country*. *The Swedish Resettlement Program*, dibentuk bertujuan bagi individu yang memerlukan perlindungan internasional. Program ini dibentuk oleh pemerintah Swedia bagian *Ministry of Justice* dan mendapatkan pengesahan daripada parlemen Swedia atau *Riksdag* dalam mendukung program ini. Setiap individu yang ingin masuk ke Swedia untuk mendapatkan perlindungan harus memiliki pengesahan dari UNHRC sebagai individu yang memiliki status pengungsi. Setiap tahun pemerintah Swedia akan mengalokasikan dana bagi menampung dan membiayai pengungsi yang ada di Swedia [10].

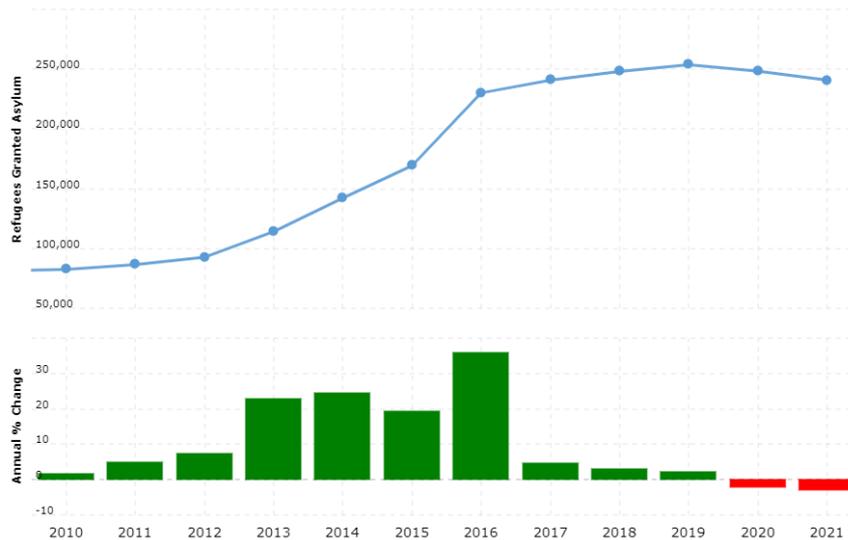
| Year | Target / quota | Main nationalities |
|------|----------------|--|
| 2010 | 1 900 | Somali, Afghan, Eritrean, Palestinian |
| 2011 | 1 900 | Somali, Afghan, Eritrean, Ethiopian |
| 2012 | 1 900 | Somali, Afghan, Eritrean, Colombian, Sudanese |
| 2013 | 1 900 | Somali, Afghan, Eritrean, Colombian, Congolese |
| 2014 | 1 900 | Syrian, Somali, Afghan, Eritrean, Colombian, Congolese |
| 2015 | 1 900 | Syrian, Somali, Afghan, Eritrean, Congolese |
| 2016 | 1 900 | Syrian, Somali, Afghan, Eritrean, Congolese |
| 2017 | 3 400 | Syrian, Afghan, Eritrean, Congolese, Sudanese |
| 2018 | 5 000 | Syrian, Afghan, Eritrean, Congolese, Sudanese, Somali, |

Gambar 1. Target *Resettlement* Swedia
 Sumber : UNHRC

Berdasarkan data yang didapatkan terdapat jumlah kuota ditetapkan dan warganegara yang paling sering datang ke Swedia dalam program *resettlement* sejak tahun 2010-2018. Pada tahun tersebut kesemua pengungsi yang ada akan diproses masuk ke negara Swedia termasuk bagi pengungsi yang sedang menunggu proses pemindahan, kuota yang disediakan oleh pemerintah Swedia ini tidak dapat digunakan

untuk pemenuhan ditahun berikutnya karena tiap tahunnya target atau kuota yang ada saja digunakan dan jika kuota masih kosong tidak dapat dialihkan ke kuota tahun berikutnya. Program *resettlement* yang diselenggarakan oleh Swedia memberikan nafas lega kepada para pengungsi karena dengan adanya program *resettlement* para pengungsi memiliki kesempatan untuk memiliki tempat berlindung akibat dari perang yang terjadi di negara asal mereka. [10]

Dampak dari perang yang terjadi membuat *resettlement country* atau negara kedua, harus menerima bahwa jumlah pengungsi tiap tahun akan terus bertambah. Jutaan pengungsi yang datang ke Swedia berharap akan mendapat hidup yang lebih baik dan bebas dari kekerasan dan ketakutan akibat perang yang terjadi di negara asal. Jika dilihat dari table diatas kuota bagi pengungsi bertambah pada tahun 2014 kemudian pada tahun 2017 jumlah kuota keseluruhan bertambah dua kali ganda secara drastik. Besarnya kuota yang diberikan pemerintah membuat meningkatnya jumlah pengungsi yang ingin masuk ke Swedia tetapi meningkatnya jumlah pengungsi yang ingin masuk ke Swedia bukan semata-mata hanya kerana kuota tetapi perang terjadi yang tidak kunjung menemukan jalan keluar dan penyelesaian. Berikut besarnya jumlah pencari suaka yang telah mendapatkan status sebagai pengungsi di Swedia dari tahun 2010 hingga 2021.



Gambar 2. Jumlah Pencari Suaka di Swedia tahun 2010-2021

Sumber: Macrotrends

Kebijakan Terkait Hukum dan Peraturan Pencari Suaka dan Pengungsi yang ingin masuk ke Swedia

Pemerintahan Swedia menyepakati perjanjian *Schengen*, menerima arus masuk para pengungsi dan migran baik dari negara Uni Eropa dan negara lainnya. Kondisi yang berlaku membuat perlunya kebijakan untuk menjaga dan melakukan pembatasan bagi mengawal semua pengungsi, pencari suaka dan migran di daerah perbatasan. Seperti yang diketahui, sebagaimana perjanjian atau kerangka kebijakan yang telah dibuat oleh Uni Eropa yaitu *Common European Asylum System (CEAS)* untuk mendukung adanya perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka, karena Uni Eropa menerapkan sistem *Open Border and Freedom Movement* sehingga setiap negara anggota harus mengadopsi nilai yang sama dalam memberikan perlindungan kepada mereka para pengungsi dan bertanggungjawab dalam menerima pencari suaka [11]. Pada tahun 2015 semua negara Eropa mengalami meningkatnya jumlah migran dan pengungsi yang datang karena perang yang terjadi di Timur Tengah. Banyak negara di Eropa mengalami keresahan terkait dengan meningkatnya jumlah para migran dan pengungsi yang datang pada tahun 2015 dan berusaha mengantisipasi daripada terjadinya masalah yang lebih serius karena peningkatan jumlah pengungsi.

Melihat aturan hukum Swedia dalam mengatur tiap pencari suaka dan pengungsi yang masuk, terdapat regulasi yang harus dilaksanakan dan diikuti. Bagi pencari suaka yang ingin mendapatkan perlindungan di Swedia harus mengajukan permohonan suaka saat ingin memasuki Swedia kepada pihak yang menjaga di

bagian perbatasan atau kepada *Migration Agency's Application Units* agar dapat di proses permohonan suaka yang diajukan. Permohonan yang diajukan tidak secara langsung akan diterima oleh Swedia tetapi akan dipertimbangkan kembali. Hal ini karena, Swedia telah menandatangani Konvensi PBB terkait dengan status pengungsi, sehingga setiap individu yang masuk ke Swedia akan di periksa tiap permohonan suaka yang diajukan secara individu. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah tidak lain bertujuan untuk mempertimbangkan identitas dan orientasi seksual dari individu pemohon, Oleh karena itu, Swedia hanya akan memberika izin tinggal kepada seseorang atau individu tersebut sebagai pengungsi jika sesuai dengan aturan dari Konvesi PBB dan Peraturan Uni Eropa [12].

Aturan yang ditetapkan dan diberlakukan oleh Swedia sangat jelas adalah bertujuan untuk menyaring dan mempertimbangkan setiap permohon pencari suaka yang ingin mendapatkan status pengungsi terpenuhi dan dapat dilindungi sesuai dengan aturan dan hukum yang telah diberlakukan. Walau demikian, pemberian status pengungsi kepada pencari suaka akan diberikan dengan catatan bahwa memiliki alasan dan bukti yang kuat layak menerima status pengungsi seperti yang disebabkan oleh ras, kebangsaan, keyakinan agama atau politik, orientasi seksual, penganiayaan yang diterima di negara asal dari pihak berwenang atau pihak yang berwenang tidak mampu memberikan perlindungan yang aman terhadap penganiayaan dari individu atau sebuah kelompok. Maka dengan itu, deklarasi status pengungsi akan diberikan dan diakui secara Internasional berdasarkan Konvensi Pengungsi PBB dan Peraturan Uni Eropa dengan izin tinggal selama tiga tahun [12] .

Memahami bahwa pemberian status pengungsi kepada mereka yang mencari suaka tidak akan diberikan secara langsung, ini dikeranakan di dalam aturan hukum bagi pencari suaka di Swedia, latar belakang status seseorang juga sangat penting dalam memberikan perlindungan sebagai syarat bagi memproses pemberian status pengungsi. Dalam hal ini, pengecualian hak atas perlindungan juga dapat terjadi bagi pemohon jika selama proses pertimbangan dan penyelidikan pemohon didapati telah melakukan kejahatan perang, kejahatan yang berkaitan dengan kemanusiaan serta kerjatan berat yang lainnya dan bahkan kejahatan yang mengancam keselamatan negara, dengan demikian pemberian suaka tidak akan diberikan oleh Swedia. Walau demikian, izin tinggal jangka waktu yang singkat dan terbatas boleh didapatkan jika dengan alasan yang kuat bahwa beresiko akan dibunuh atau dianiaya [12]. Selain itu, pertimbangan bagi pencari suaka anak juga diatur menurut hukum Swedia bagian Badan Migrasi. Semua anak memiliki hak untuk didengarkan dalam menyampaikan pendapatnya mencari suaka. Anak tersebut juga harus diperiksa secara individu dan alasan mencari suaka dengan menginvestigasi usia, kesehatan dan kedewasaan anak tersebut. Anak tersebut juga berhak didampingi walinya secara sah atau/dan pengacara [12].

Swedia sebagai negara yang turut merasakan dampak dari peningkatan jumlah pengungsi yang masuk, maka berbagai macam antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Swedia seperti pengetatan di bagian perbatasan, melakukan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap setiap pengungsi yang masuk untuk menghindari dari pengungsi illegal yang masuk tanpa ijin yang sah. Seperti yang diketahui bahwa pengungsi merupakan kelompok sosial yang rentan. *Convention of Geneva* merupakan konvensi yang menentukan bahwa tiap pengungsi yang masuk ke dalam negara yang telah ditetapkan, perlu diperlakukan dengan selayaknya karena mereka merupakan kelompok yang tidak mampu untuk kembali ke negara asal dan berdasarkan pada prinsip *non-refoulment*, pengungsi tidak dapat dikembalikan ke negara asal mereka jika kondisi dinegara asal mereka masih berada dalam keadaan rentan dan bahaya [13]. Pada tahun 2015, semua pengungsi yang masuk ke wilayah Eropah termasuk Swedia harus menghadapi stigma bahwa resiko yang dibawa oleh pengungsi. Perdana Menteri Swedia Stefan Loven, partai dari sayap kiri di kenal sebagai *Sweden Social Democratic Party (Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, SAP)*, mengeluarkan juga kebijakan baru serta pengetatan terhadap undang-undang bagi anak-anak pengungsi dengan pemberian status haruslah tidak lebih dari 18 tahun dengan melakukan pemeriksaan identitas [14]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat lihat bahwa, aturan bagi mereka yang mengajukan permohonan suaka sebagai syarat mendapatkan status sebagai pengungsi di Swedia, harus melewati proses regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Swedia. Tahun 2015 merupakan kondisi yang yang sangat mencabar bagi Swedia karena pada tahun tersebut kebijakan baru terhadap pencari suaka, pengungsi dan migran telah di perbaharui karena sebanyak 162,877 pencari suaka telah masuk ke Swedia yang merupakan gelombang dari Syria, Afganistan, dan negara lain yang tiba di Eropa bagi mendapatkan perlindungan [15]. Pemerintah dan Lembaga negara Swedia melihat kondisi yang terjadi pada tahun 2015 ini merupakan sebagai ancaman eksistensial terhadap kedaulatan dan birokrasi sehingga membuat pemerintah merasa bahwa kodisi yang terjadi merupakan tekanan pada birokrasi [16].

Respon Pemerintah Swedia terhadap Masalah Pengungsi: Pemberlakukan *Open Border Kepada U-turn Policy*

Stefan Lofven sebagai Perdana Menteri Swedia, mulai menjabat pada 3 Oktober 2014 merupakan anggota dari partai *Swedish Social Democratic Party*. Stefan memberikan respon yang baik pada awal kepemimpinan beliau terhadap pengungsi karena beliau ingin mempertahankan Swedia sebagai Negara Kesejahteraan bukan hanya sekadar label nama saja. Stefan Lofven juga mengatakan bahwa, “*My Europe does not build walls!*”. Pernyataan dari Stefan ini tidak bertahan dengan lama karena satu tahun kemudian Swedia mulai merasakan peningkatan dari jumlah kemasukan pengungsi membawa dampak yang besar. Tepat tahun 2015 semua negara Eropa menerima arus pengungsi yang tinggi dan tidak terkecuali Swedia yang menerima permohonan dari pengungsi sebanyak 800,000 pada bulan September dan Oktober, kemudian disusul beribu pengungsi yang berdatangan sehingga Swedia menerima sebanyak 162,877 pengungsi [5].

Kondisi di Swedia juga mengalami beberapa perubahan dalam sistem pemerintah, jika sebelumnya pemerintah Swedia terkenal sangat menerima baik dengan terbuka para migran dan pengungsi, kini berubah drastis dengan membuat kebijakan pengetatan kemasukan pengungsi, pencari suaka dan imigran dari luar. Hal ini dilakukan karena Swedia memiliki alasan yang tersendiri dimana negara dengan kesejahteraan ini melihat perlunya penanganan dalam meningkatnya jumlah pengungsi dan harus membuat kebijakan terkait kemasukan para pengungsi atau imigran yang datang. Kebijakan yang berubah tidak terlepas dari dikaitkan dengan Partai Demokrat Swedia yang merupakan partai anti-migran dan pengungsi tetapi pada tahun 2014-2020 Swedia masih di bawah pimpinan Stefan Lofven yang merupakan koalisi dari Partai Sosial Demokrat Swedia [17].

Kebijakan *u-turn policy* yang telah di tetapkan terkait dengan izin tinggal permanen bagi para pengungsi yang tidak direlokasikan menjadi izin tinggal sementara sebagai langkah awal dalam mengatasi masalah peningkatan jumlah pengungsi. Pengungsi yang sedang mengajukan *family reunification* juga dibatasi sebagai cara menekan dari jumlah pengungsi yang masuk bertambah [18]. Masuknya pengungsi secara massal membuat pemerintah Swedia menganggap hal tersebut sebagai suatu ancaman keamanan nasional terhadap Swedia dan birokrasi Swedia untuk berkembang dan menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia. Sebagai sebuah negara yang berusaha memberikan perlindungan kepada pengungsi, masuknya pengungsi secara massal dikonstruksikan oleh pemerintah Swedia sebagai ancaman karena dalam hal ini Swedia merupakan negara yang memberikan perlindungan internasional kepada orang-orang teraniaya meskipun hak suaka adalah sesuatu yang universal [16].

Penekanan masuk pengungsi secara jelas bagi mengawal jumlah pengungsi dan pencari suaka di Swedia sejak akhir 2015. Pengungsi yang tidak direlokasi tidak memiliki cara lain untuk menetap di Swedia dan satu-satunya cara agar mereka yang tidak dapat direlokasi dapat mengubah status pengungsi mereka dari status sebagai pengungsi sementara kepada permanen adalah dengan mampu untuk menghidupi diri sendiri. Para pengungsi dapat membuktikan bahwa mereka mampu untuk memperoleh kemandirian finansial dengan memiliki pekerjaan di Swedia. Tujuan utama dari kebijakan peraturan tersebut adalah sebagai salah satu cara menekan dari jumlah pencari suaka dan pengungsi datang dan sebagai strategi bagi menurunkan minat pencari suaka dan pengungsi untuk datang ke Swedia. Pembatasan yang dilaksanakan berhasil menurunkan jumlah pencari suakan yang datang ke Swedia pada tahun 2016 sehingga dilihat kebijakan tersebut sangat efektif [18]. Cara ini merupakan salah satu respon yang dilakukan negara-negara di Uni Eropa termasuk Swedia sebagai bentuk pengetatan kebijakan pencari suaka.

Dalam waktu yang sama, tanggapan dan respon Swedia terkait dengan krisis yang terjadi sangat menentukan kondisi bangsa karena dapat saja menjadi lemah dan hancur atau diperkuat sehingga tanggapan dan respon yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat penting bagi masa depan negara Swedia. Langkah mengawal perbatasan merupakan salah satu tindakan awal yang tepat bagi merespon masalah krisis pengungsi yang terjadi di Swedia dan permohonan untuk melakukan kontrol dan perbatasan juga telah diizinkan oleh Uni Eropa [16]. Mempertimbangkan kebijakan dan memberikan ruang bagi masyarakat menyuarakan keresahan terhadap masalah pengungsi dan pencari sangat penting karena banyaknya yang dialami oleh masyarakat Swedia terkait dengan masalah yang terjadi. Respon yang diberikan memang sangat penting dan kesepakatan terkait dengan isu perbatasan dapat dicapai jika selama proses penggarapan kebijakan dijalankan dengan baik dan tantangan bagi keteraturan para

pengungsi dan suaka masuk secara ilegal juga dapat terjadi jika dalam keadaan terdesak dengan alasan ingin rasa aman dan hidup lebih baik [19].

Tantangan pemerintah Swedia dalam memberlakukan kebijakan yang baru.

Kondisi dilapangan yang terjadi membuat Swedia memberikan respon dan angkat suara terhadap arus pencari suaka dan pengungsi yang meningkat sebagai langkah awal dalam mengatasi masalah yang terjadi. Respon awal yang diberikan oleh pemerintah Swedia adalah mengenakan pengecekan pada perbatasan di akhir tahun 2015 bulan November dengan memeriksa semua kereta dan feri yang datang dari negara Eropa lainnya dengan memeriksa semuka dokumen yang lengkap yang dimiliki [6]. Melihat dari permasalahan pengungsi yang tidak akan ada jalan keluar, Swedia harus mengeluarkan kebijakan keamanan yang bertujuan utama bagi mengatasi dari masuknya pengungsi dan pencari suaka yang terus berkepanjangan. Masalah pengungsi yang terjadi disadari menjadi permasalahan baru setelah pasca-perang dingin dan termasuk kedalam masalah non-tradisional yang tidak hanya terpaku kepada masalah kekuasaan saja jika merujuk kepada masalah keamanan tradisional. Pencari suaka dan pengungsi digambarkan sebagai individu yang mencari perlindungan dari negara lain karena mereka meninggalkan negara asal akibat adanya ancaman bagi kelangsungan hidup. Harapan setiap pencari suaka adalah mendapatkan klaim perlindungan supaya status mereka dapat berubah menjadi pengungsi.

Swedia sebagai negara dengan model *welfare*, terkenal dengan pengecualian dan selalu memberikan ruang bagi para pencari suaka dan pengungsi bagi mendapatkan perlindungan. Negara Kesejahteraan Swedia telah terbentuk setelah Perang Dunia II yang didasarkan pada kebijakan pasar tenaga kerja [20]. Meningkatnya arus pengungsi dan pencari suaka, undang-undang yang baru telah dikeluarkan bertujuan pembatasan kemasukan. Kapabilitas Swedia sebagai negara yang menganut *welfare* menjadi tantangan hal ini karena, tidak adanya pengecualian dalam pemberlakuan layanan social yang termasuk pengungsi yang dilihat dapat mengancam negara kesejahteraan [21] dan penetapan standar terhadap perilaku kepada pengungsi juga harus menjadi tantangan tanpa mengurangi perilaku yang baik oleh negara kepada mereka. [22]

National Security atau keamanan nasional Swedia menjadi salah satu tantangan yang besar bagi pemerintah Swedia pada akhir tahun 2015. Pemahaman terkait dengan keamanan nasional sendiri terbagi dari dua yaitu secara tradisional yang sangat dekat dengan isu konvensional atau kekuatan militer seperti persenjataan, perang, dan perlombaan senjata. Non-tradisional yang saat ini melihat bahwa masalah keamanan nasional tidak hanya terkait dengan masalah berkaitan kekuatan militer tetapi juga yang berkaitan dengan lingkungan, terorisme, pengungsi dan migrasi, kejahatan transnasional, dan sebagainya sehingga masing-masing pendekatan memiliki pandangan masing-masing terkait dengan keamanan nasional [23]. Ancaman terhadap *national security*, telah berubah setelah Perang Dunia II dan kondisi ancaman yang terjadi juga tergantung terhadap fenomena yang terjadi dengan mengindikasikan ancaman *national security* seperti stabilitas negara, nilai-nilai nasional terancam, ancaman yang dilihat sporadic atau berkelanjutan, ancaman yang perlu penanganan segera serta beberapa indikasi lain yang dapat dilihat sebagai ancaman. [22]

Permasalahan terkait dengan pengungsi dilihat sebagai sebuah fenomena yang kompleks, karena melibatkan sekelompok masyarakat yang melintasi perbatasan negara dalam jumlah yang besar. Kasus terkait dengan pencari suaka dan pengungsi, menjadi salah satu masalah internasional yang dilihat urgen pada abad ke-21 ini. Implikasi dari arus masuk pengungsi dan pencari suaka ini juga dirasakan, seperti perbedaan dari latar belakang pengungsi yang sedang berada di kamp pengungsian, pengungsi juga dapat saja menargetkan masyarakat umum dalam melakukan tindakan kriminal karena berpikir hal tersebut merupakan salah satu cara bertahan hidup dan sebagainya [22]. Pemerintah melakukan perubahan kebijakan terbuka menjadi restriktif terkait dengan kebijakan migran dan pengungsi sangat jelas adalah bertujuan untuk mempertahankan *national security* yang dilihat dapat berimplikasi kepada identitas.

Tantangan terhadap kriminalitas juga menjadi perdebatan di Swedia, bahkan pada penyebaran Islamisme juga kini dilihat sesuatu permasalahan yang serius. Hal ini karena adanya pihak muslim Swedia yang melakukan kekerasan di Swedia dan terdapat juga warga yang memutuskan untuk berperang demi *Islamic State in Syria and the Levant* atau dikenal sebagai ISIS. Integrasi hukum dan sosial sangat ditekankan bagi menekan adanya perluasan organisasi-organisasi yang bersifat radikalisme yang telah menjadi kekhawatiran pemerintah Swedia yang dapat mengganggu keamanan nasional dan sistem kesejahteraan [15].

Pada tahun 2017 dicatatkan terdapat 5 orang yang terbunuh dan beberapa lagi luka saat terjadi peyerangan di Stockholm. Hukuman telah dijatuhkan oleh Pengadilan distrik Stockhol terhadap yang terdakwa karena terbukti bersalah dengan tindak pidana terorisme dengan catatan terdapat lima *record* kasus pembunuhan dan percobaan pembunuhan yang telah beberapa kali dilakukan. Terdakwa menerima putusan pengadilan dan diusir dari Swedia seumur hidup [24]. Dikatakan juga, jika tiap tahun terdapat peningkatan satu persen pengungsi yang masuk ke Swedia, maka tingkat kriminalitas juga ikut meningkat. Berdasarkan temuan yang didapatkan, jika peningkatan jumlah pengungsi sebesar 1% maka tingkat kriminalitas terhadap orang sebesar 0,42%-0,55 akan meningkat. Antara tindakan kriminalitas yang dilakukan adalah penyerangan, kejahatan publik, perampokan dan pencurian. [25].

Tantangan yang sering terjadi yang sering juga adalah terkait dengan *Placement Program* atau program penempatan bagi para pengungsi. Sejak krisis pengungsi yang terjadi program penempatan bagi pengungsi dan pencari suaka juga turut merasakan tekanan didalamnya. Kebijakan terkait dengan perumahan dan penyebaran pengungsi telah berubah dari waktu ke waktu yang dimana awal dari kebijakan ini dibuat adalah bertujuan untuk menghindari dari adanya pengelompokan etnis yang sudah dilakukan sejak tahun 1980. Tiap pemerintahan kota akan akan disebara sehingga tidak ada konsentrasi pada satu kota saja terkait dengan hal ini tetapi seiring berjalannya waktu, undang-undang baru juga diperkenalkan bagi tujuan mendorong pencari suaka mencari tempat tinggal sendiri selama proses suaka. Meskipun dilapangan undang-undang ini tidak serta merta dilibatkan pencari suaka untuk menetap diluar pusat penerimaan terdapat konsekuensi bagi pemerintah kota yang akan ditanggung karena harus mengontrol pemukiman pengungsi [26]. Dampak dari meningkatnya jumlah pengungsi kini membuat kota yang sebelumnya tidak memiliki jumlah pengungsi yang terlalu banyak harus turut menerima pengungsi dengan jumlah yang lebih banyak. Hal ini terjadi karena menghindari dari terjadinya jumlah pengungsi yang tidak merata hanya di satu tempat saja karena jika sebelumnya pemerintah kota-kota berhak dalam memilih untuk menerima atau menolak pengungsi. Selama proses penempatan dilaksanakan tidak terlepas dari permasalahan kriminalitas dan kesulitan dalam menemukan rumah atau tempat bagi keluarga yang memiliki banyak anak. Permasalahan perumahan menjadi sesuatu yang sulit dan jangka panjang sehingga jika tidak diatasi dengan segera [27].

Swedia sebagai salah satu negara yang menerima arus pengungsi yang tinggi di Uni Eropa telah mengambil langkah maju dahulu dengan melakukan *Securitization* atau sekuritisasi. Dalam proses melakukan *securitization* yaitu *securitizing actor*, *speech act*, *target audience*, *existential threat* dan *referent object*. Perlu dipahami bahwa *securitization* berlaku jika ada *politicization*, yang bermakna jika sebuah isu atau masalah publik yang tidak mengalami dipolitisasi maka hal tersebut tidak mengalami *securitization* tetapi jika sebuah isu atau masalah tersebut melalui atau mengalami politisasi dapat dikatakan isu tersebut dapat menjadi kebijakan publik yang kemudian membutuhkan keputusan pemerintah sehingga terjadi *securitization*. Menurut Buzan *securitization* dapat terjadi jika adanya ancaman *existential threats* sehingga membutuhkan tindakan penanganan cepat dilaksanakan dengan prosedur yang diluar batas normal dalam politik. *Securitizing actor*, merupakan actor yang akan melakukan *securitizer* karena melihat urgensi dari munculnya *existential threat*, awalnya bukan sesuatu urgensi berubah menjadi ancaman keamanan hingga menjadi kasus *securitization* [28]

Securitizing yang terjadi tidak terletak kepada actor yang melakukan *securitizer* tetapi bagaimana *target audience* merespon dan menerima bahwa benar *existential threat* yang disampaikan oleh *securitizing actor* dengan cara *speech act* benar bahwa memberikan ancaman sehingga dapat dikatakan berhasilnya sebuah *securitization* jika *target audience* menerima *speech act* yang di umumkan oleh *securitizing actor* dengan menyarakan bahwa negar[21]a sedang menjadi *referent object*. Buzan juga berpendapat “*States can claim their own right of survival over above that of their indivisual citizens*”[29]. Terkait dengan masalah negara Swedia, jika dilihat dengan kondisi yang terjadi, banyaknya para pencari suaka dan pengungsi yang datang ke Swedia membuat pemerintah melihat bahawa hal ini merupakan suatu hal yang perlu diatasi dan ditangani segera karena hal ini sangat berkaitan dengan keamanan identitas negara sekaligus bahkan menyangkut dengan kepentingan pemerintah. Sehingga berdasarkan dari penjelasan di atas ini terkait dengan teori sekuritisasi penulis menganalisis bahwa pemerintah Swedia telah melakukan sekuritisasi dengan kebijakan baru yang dikeluarkan berkaitan dengan migrasi dan pengungsi.

Masyarakat Swedia mulai merasakan bahwa jumlah pengungsi yang masuk dapat memberikan tekanan karena harus membayar pajak yang tinggi bagi menampung kos biaya hidup mereka yang datang ke Swedia. Pemerintah juga membuat kebijakan menaikkan pajak yang bertujuan untuk menyeimbangi pemasukan dan pengeluaran untuk membiayai mereka para pencari suaka dan pengungsi agar dapat menyeimbangi sistem kesejahteraan. Hal di dilihat menjadi sebuah keresahan ditambah meningkatnya arus yang diterima dari gelombang pengungsi yang terjadi ini sehingga menjadi sebuah keputusan yang kurang adil bagi masyarakat Swedia jika dibebankan lebih tinggi pajak negara [21]. Keresahan masyarakat juga turut muncul terkait dengan kriminalitas yang terjadi di kalangan wanita Swedia. Dari penelusuran banyak tindakan kriminal yang dilakukan oleh lelaki dan mayoritas merupakan pendatang asing. Tindakan yang dilakukan kerena dari ekonomi lelaki yang dimana akibat dari kemiskinan sehingga tindakan kejahatan dilakukan. Tidak hanya hal tersebut, masalah pendidikan juga masih menjadi suatu hal yang serius karena banyaknya dari mereka yang kurang pendidikan yang membuat perilaku kekerasan dilakukan terhadap perempuan [6].

Masyarakat juga melihat bahwa kehadiran dari pengungsi merupakan kelompok yang rentan karena dilaporkan, pengungsi memiliki proporsi yang tinggi dalam tingkat obesitas dibanding dari populasi lainnya bahkan perokok yang tinggi. Disadari bahwa, akses yang terbatas terhadap pengungsi menjadi hambatan sehingga, resiko yang tinggi dapat dibawa oleh para pengungsi ini ke masyarakat social. Di awal tahun 2020 salah satu tantangan yang terberat yang dihadapi oleh pemerintah Swedia adalah dengan Covid-19. Banyak para migran yang meninggal berbanding dari penduduk lainnya karena minimnya pengetahuan terkait dengan informasi kesehatan bahkan tidak mempercayai pihak medis yang bertugas. Permasalahan ini menjadi satu delemata bagi masyarakat dan pemerintah terkait dengan kondisi kemanusiaan nasional dari sisi kesehatan [30].

KESIMPULAN

Permasalahan pengungsi yang terjadi di Swedia merupakan masalah yang sangat serius dikarenakan, permasalahan yang terjadi merupakan tantangan yang mencabar bagi Swedia sebagai negara dengan sisten kesejahteraan. Arus pengungsi yang terjadi pada tahun 2015 di seluruh Eropa merupakan titik bailik bagi beberapa negara Eropa termasuk Swedia. Keputusan mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan pengungsi di Swedia tidak hanya melibatkan kepentingan politik pemangku saat tersebut di Swedia. Permasalahan dalam peningkatan dan lonjakan terhadap jumlah pengungsi juga membuat adanya regulasi baru yang dikeluarkan bagi tujuan untuk mengatasi dari masuknya pengungsi yang meningkat. Stefan Loven sebagai perdana menteri Swedia sekaligus ahli dari partai *Sweden Social Democratic Party* harus mengeluarkan kebijakan agar tidak mengancam terhadap identitas yang multikultur di Swedia. Dukungan warga terhadap dengan keputusan pengetatan dan perubahan kebijakan juga didorong karena biaya pajak yang harus di tanggung oleh masyarakat. Biaya yang tinggi dikenakan dan akan di salurkan pada bagian layanan publik termasuk membiayai para pengungsi yang ada di Swedia.

Dari hal ini dapat dilihat bahwa dukungan dalam masalah ini sangat kuat sehingga proses sekuritisasi juga berjalan bagi membendung permasalahan seperti kriminalitas. Swedia masih menerima pengungsi, tetapi kebijakan yang dilakukan adalah sebagai bentuk awal dalam mengatasi dan membendung dari masuknya lonjakan pengungsi dan pencari suaka di Swedia. Sebagai negara yang sangat terbuka terhadap pencari suka dan pengungsi, Swedia masih tetap menjadi tempat bagi mereka yang memerlukan perlindungan dari perang dan masalah politik yang terjadi di negara asal. Walau kebijakan *u-turn policy* dilakukan, masih ada kesempatan yang dapat didapatkan oleh pencari suaka dan pengungsi mendapat perlindungan. Oleh itu, dari kasus yang terjadi di Swedia ini, masyarakat internasional perlu melihat dan memberi peluang bagi pengungsi dan pencari suaka untuk mendapat perlindungan terlebih akibat perang yang terjadi. Sekuritisasi yang dilakukan tidaklah terlalu buruk tetapi dapat mengkontor dan mengatur semua aturan dan kebijakan agar lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Data. Info, "Population growth in Sweden." <https://www.worlddata.info/europe/sweden/populationgrowth.php> (accessed Feb. 14, 2023).
- [2] S. Institute, "Sweden and Migration." <https://sweden.se/culture/history/sweden-and-migration> (accessed Feb. 14, 2023).

- [3] T. W. Bank, "Refugee population by country or territory of origin - Sweden." https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.REFG.OR?end=2015&locations=SE&name_desc=false&start=2010&view=chart (accessed Feb.14,2023).
- [4] E. Commission, "Background on Schengen enlargement," 2008. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_07_619 (accessed Jun. 09, 2023).
- [5] E. Commission, "Finding Beds For Refugees." https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2019-12/03_factsheet-amif-finding-beds-refugees.pdf (accessed May 09, 2023).
- [6] P. Larasati, "Perubahan Kebijakan Swedia terkait Krisis Pengungsi Periode 2014-2017," 2018. (accessed Feb.14,2023)
- [7] N. E. Parliament, "Swedish Prime Minister on refugee crisis: 'We must move from chaos to control,'" 2016. <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20160304STO17407/swedish-prime-minister-on-refugee-crisis-we-must-move-from-chaos-to-control> (accessed May 09, 2023).
- [8] E. Commission, "Governance of Migrant Integration in Sweden." https://ec.europa.eu/migrant-integration/country-governance/governance/sweden_en (accessed Jun. 07, 2023).
- [9] D. H. Harahap, Penelitian Kualitatif. Medan Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020. (accessed Jun. 09, 2023).
- [10] Refworld, "UNHCR Resettlement Handbook, Country Chapter - Sweden," UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2014. <https://www.refworld.org/docid/542125334.html> (accessed Jun. 09, 2023).
- [11] E. Commission, "Common European Asylum System." https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system_en (accessed Apr. 18, 2023).
- [12] Migrationsverket, "Asylum Regulations," Migrationsverket, 2023. <https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-and-asylum-in-Sweden/Applying-for-asylum/Asylum-regulations.html> (accessed Feb. 14, 2023).
- [13] E. Verleyen and K. Beckers, "European Refugee Crisis or European Migration Crisis? How Words Matter in the News Framing (2015–2020) of Asylum Seekers, Refugees, and Migrants," *Journal. Media*, vol. 4, no. 3, pp. 727–742, 2023, doi: 10.3390/journalmedia4030046. (accessed Jun. 09, 2023).
- [14] M. Krzyżanowski, "'We Are a Small Country That Has Done Enormously Lot': The 'Refugee Crisis' and the Hybrid Discourse of Politicizing Immigration in Sweden," *J. Immigr. Refug. Stud.*, vol. 16, no. 1–2, pp. 97–117, 2018, doi: 10.1080/15562948.2017.1317895. (accessed Jun. 09, 2023).
- [15] A. Skodo, "Sweden: By Turns Welcoming and Restrictive in its Immigration Policy," *Migration Policy Institute*, 2018. <https://www.migrationpolicy.org/article/sweden-turns-welcoming-and-restrictive-its-immigration-policy> (accessed Aug. 08, 2023).
- [16] A. Skodo, "Lesson for the future or threat to sovereignty? Contesting the meaning of the 2015 refugee crisis in Sweden," *Refug. violence Welf. Bur. North. Eur.*, pp. 50–66, 2020 (accessed Aug. 08, 2023).
- [17] F. P. L. Politique, "'Sweden Democrats': an anti-immigration vote." <https://www.fondapol.org/en/study/sweden-democrats-an-anti-immigration/> (accessed Jun. 09, 2023).
- [18] S. Scarpa and C. U. Schierup, "Who undermines the welfare state? Austerity-dogmatism and the upturn in Swedish asylum policy," *Soc. Incl.*, vol. 6, no. 1, pp. 199–207, 2018, doi: 10.17645/si.v6i1.1285. (accessed Aug. 08, 2023).
- [19] Y. Eka Nizmi, "Globalisasi, Imigrasi, Dan Keamanan Identitas Eropa," *J. Tapis J. Teropong Aspir. Polit. Islam*, vol. 12, no. 1, pp. 130–149, 2016, [Online]. Available: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/832> (accessed Aug. 08, 2023).
- [20] M. Dahlstedt and A. Neergaard, "Crisis of Solidarity? Changing Welfare and Migration Regimes in Sweden," *Crit. Sociol.*, vol. 45, no. 1, pp. 121–135, 2019, doi: 10.1177/0896920516675204 (accessed Feb. 15, 2023).

- [21] S. Salsabila, "Reorientasi Kebijakan Migrasi Terbuka dalam Sistem Negara Kesejahteraan Swedia pada Masa Krisis Migran Eropa Tahun 2015," *J. Anal. Hub. Int.*, vol. 7, no. 3, pp. 357–376, 2018, [Online]. Available: <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahidf29e576c6full.pdf> (accessed Aug. 15, 2023)
- [22] I. V. Omeokachie, "the Security Implications of the Refugee Situation in South Africa," no. July, 2013.
- [23] U. S. Bakry, "STUDI KEAMANAN INTERNATIONAL PASCA PERANG DINGIN," *J. Altern.*, vol. 1, no. 8.5.2017, pp. 1–16, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal-jayabaya.id/Alternatif/article/view/15/11> (accessed Nov. 15, 2023)
- [24] G. O. of Sweden, "Facts about migration, integration and crime in Sweden," Affairs, Ministry for Foreign, 2017. <https://www.government.se/articles/2017/02/facts-about-migration-and-crime-in-sweden/> (accessed Nov. 15, 2023).
- [25] A. Rojas, "Refugees and crime : Has the recent refugee immigration altered crimes in Sweden?*" no. ii, 2019 (accessed Nov. 15, 2023).
- [26] H. Emilsson and K. Öberg, "Housing for Refugees in Sweden: Top-Down Governance and its Local Reactions," *J. Int. Migr. Integr.*, vol. 23, no. 2, pp. 614–631, 2022, doi: 10.1007/s12134-021-00864-8 (accessed Nov. 15, 2023).
- [27] N. Juliandini, *Analisis Kebijakan Luar Negeri Swedia Terhadap Pengungsi Suriah*. 2021.
- [28] B. Buzan, O. Waever, and J. de Wilde, *Security. A New Framework fo Analysis*. London: Lynne Rienner Publishers. London: Lynne Rienner Publishers, 1998 (accessed June. 15, 2023).
- [29] S. Tadjbakhsh and A. M. Chenoy, *Human Security: Concepts and implications*.
- [30] M. Elisabeth, P. S. Maneesh, and S. Michael, "Refugees in Sweden During the Covid-19 Pandemic—The Need for a New Perspective on Health and Integration," *Front. Public Heal.*, vol. 8, no. October, pp. 6–10, 2020, doi: 10.3389/fpubh.2020.574334 (accessed May 09, 2023).